

**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE)
(Studi Kasus di KUBE Sejahtera Berhati Nyaman 014, Kelurahan Terban, Kota
Yogyakarta)**

Heni Kusumaningrum

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Abstract

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) is one of the poverty reduction program of the Ministry of Social. KUBE is also one of the strategic program of the Yogyakarta's Government as poverty reduction efforts and the empowerment of the poor. This research was conducted on KUBE Sejahtera VII Berhati Nyaman 014. KUBE Sejahtera VII Berhati Nyaman 014 formed in 2008 and is located in Gondokusuman, Terban, Kota Yogyakarta.

Although categorized as unproductive, KUBE Sejahtera VII Berhati Nyaman 014 fortunate in 2011, they got help from BLPS or venture business development. As for the factors that ensure an empowerment process KUBE Sejahtera VII Berhati Nyaman 014 are: a) KUBE's criteria program; b) Individual mental recipient; c) Accompaniement being performed; d) Network.

Keywords: *Kube, poverty reduction, community development.*

Pendahuluan

Sejak tahun 1970-an, pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial. Untuk menyukseskan penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan saling mendukung. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan antara lain: 1) Menyempurnakan program perlindungan sosial; 2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan masyarakat, dan; 4) Pembangunan yang inklusif.

Demi menyukseskan strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, maka dirumuskan beberapa instrumen program meliputi:

1. Klaster I, yaitu meliputi program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial → model *cash conditional transfer* (PKH) atau *cash transfer* (BLT, Bansos) maupun bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan benih bagi petani/kapal bagi nelayan miskin.
2. Klaster II, yaitu meliputi program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat → KUBE, PNPM Mandiri, dan lain-lain.
3. Klaster III, yaitu meliputi program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil → Pemberian kredit usaha UKM dan lain-lain.

Penggolongan program menjadi 3 (tiga) instrumen tersebut berlaku untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai departemen/instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Demikian halnya dengan Kementerian Sosial yang menggandeng Pemda (Dinas Sosial), yang meluncurkan KUBE sebagai program unggulan sekaligus bentuk tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu daerah yang melaksanakan program KUBE adalah Kota Yogyakarta. KUBE menjadi salah satu program strategis yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran berkelompok untuk kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, ekonomi produktif dengan mengembangkan usaha yang mampu memberi nilai tambah ekonomis dan kemandirian melalui infrastruktur ekonomi-sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada Kube Sejahtera VIII BERHATI NYAMAN 014 (selanjutnya disebut KUBE VIII/014), yang merupakan KUBE bentukan tahun 2008 dengan berlokasi di kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Kajian Teori dan Pembahasan

Pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Pemberdayaan

yang dimaksud adalah suatu pembangunan yang berorientasi kepada manusia, peran serta atau partisipasi dari manusia itu sendiri, bersifat memberdayakan manusia, serta berkelanjutan. Dengan kata lain, konsep pemberdayaan masyarakat juga mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pemberdayaan sendiri menurut pemerintah adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Anwas (2013) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Sedangkan menurut Mardikanto & Soebianto (2013), pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

KUBE merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif. Aktivitas positif tersebut dapat berbentuk kegiatan pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan, dan kegiatan lainnya. Adanya kelompok atau organisasi masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dalam berbagai bidang. Selain itu, tujuan akhir dari adanya KUBE adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial keluarga.

KUBE sebagai Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan

KUBE adalah program Pemberdayaan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa sendiri. KUBE diharapkan sebagai media pemberdayaan sosial yang diciptakan pemerintah untuk membangun kemampuan memecahkan masyarakat, kebutuhan dan mengembangkan potensi dari fakir miskin tersebut. Di dalam KUBE para anggota diharapkan mampu memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan kegotongroyongan dan rasa kesetiakawanan.

Terdapat beberapa alasan mengapa KUBE menjadi program unggulan Kementerian Sosial bersama PEMDA, di antaranya: (1) sasaran utama dari program ini merupakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan mencakup keterbatasan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kemampuan, ketrampilan, kepemilikan modal, jejaring sosial, komunikasi, teknologi, dan lain-lain; (2) sistem KUBE memastikan kegiatan usaha masyarakat yang pada awalnya dilakukan secara sendiri-sendiri akan dikembangkan dalam kelompok. Usaha kelompok ini diharapkan akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring. Dengan usaha kelompok, masing-masing anggota KUBE dapat saling bekerjasama secara lebih mudah dibanding ketika melakukan usaha secara sendiri-sendiri. (3) KUBE dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian sosial para anggota dan keluarganya. Yang dimaksud keberfungsian sosial ini adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mampu merubah sikap dan tingkah laku ketika menghadapi permasalahan, serta meningkatnya kemampuan dalam menjalani peran sosialnya di masyarakat. Terdapat beberapa kriteria masyarakat yang akan mendapat program bantuan KUBE, di antaranya:

1. Kriteria

- a. Kepala Keluarga Fakir Miskin (biasanya menggunakan data PPLS).
- b. Warga masyarakat yang berdomisili tetap dan berdekatan tempat tinggal.
- c. Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.
- d. Sudah Menikah, Usia Produktif 18 s.d 56 tahun atau lebih.
- e. Tidak ada hubungan darah (kakak-adik, suami-istri).
- f. Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.
- g. Jumlah anggota KUBE 10 KK.

2. Pembentukan KUBE mempertimbangkan:

- a. Kedekatan tempat tinggal.
- b. Jenis usaha atau keterampilan anggota.
- c. Ketersediaan sumber daya alam/keadaan geografis.
- d. Latar belakang kehidupan budaya.
- e. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

Dalam perkembangannya program KUBE dilakukan dalam 5 (lima) tahap yang meliputi:

1. Tahap persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari orientasi, observasi, registrasi, perencanaan program, penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi.

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi seleksi calon keluarga binaan sosial, pembentukan prkelompok, pemilihan jenis usaha, pelatihan pendamping bantuan stimulan permodalan, pendampingan dan evaluasi oleh aparat desa dan petugas terkait.

3. Tahap pengembangan usaha

Kegiatan pada tahap ini meliputi bimbingan pendampingan usaha pemberian bantuan pengembangan usaha pendampingan dan evaluasi oleh pendamping.

4. Tahap kemitraan usaha

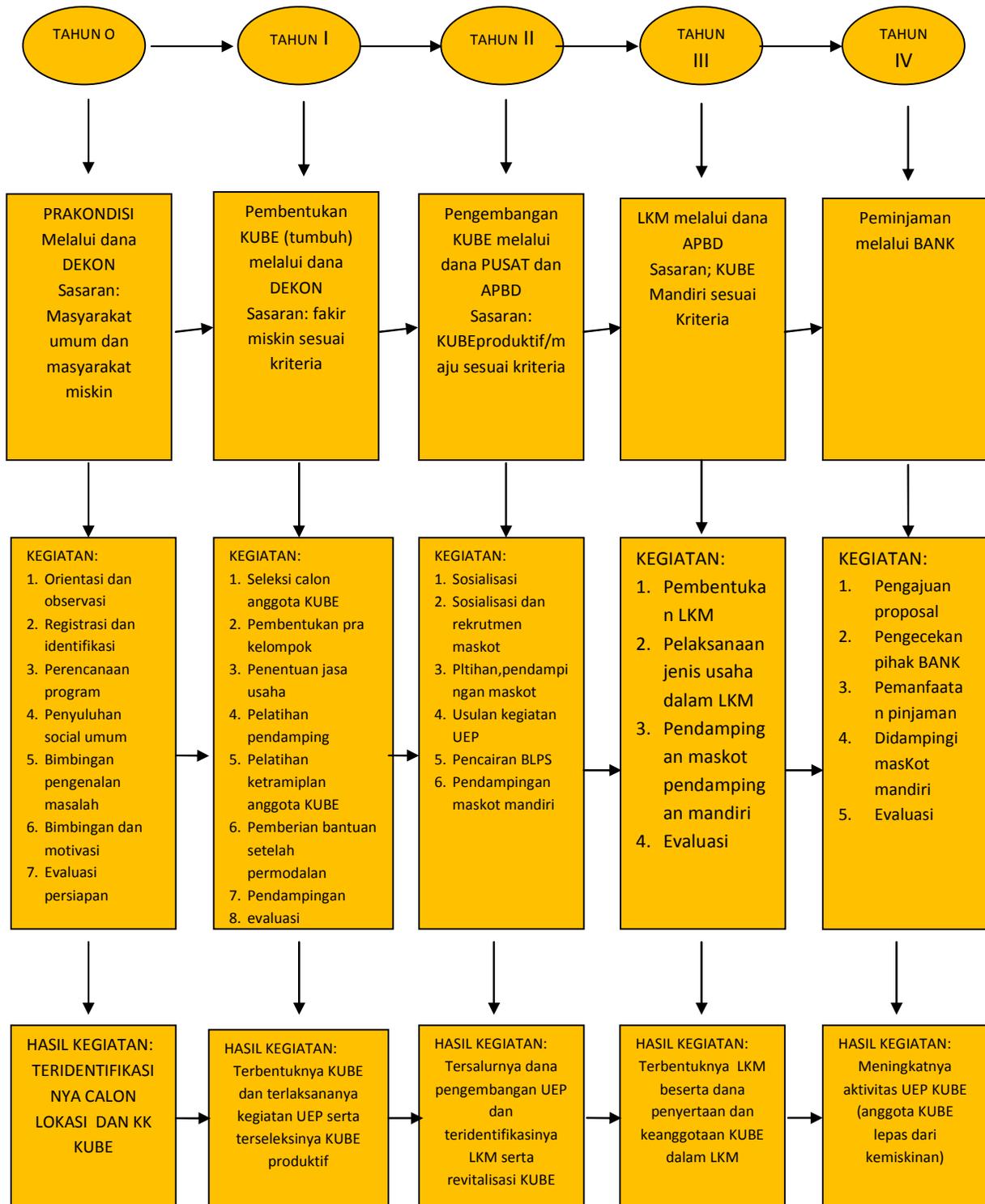
Kegiatan pada tahap ini meliputi inventaris sumber daya yang ada, membuat kesepakatan antar anggota kelompok, kemitraan usaha, perluasan jaringan kemitraan, evaluasi oleh pendamping dan pendamping fungsional pelaksanaan kemitraan usaha bimbingan.

5. Tahap monitoring dan evaluasi

Pengendalian dan monitoring proses pelaksanaan, evaluasi kebijakan berhasil atau tidak oleh pendamping, pendamping fungsional dan perwakilan pemerintah/pemda.

Adapun kegiatan, sasaran dan pembagian tugas antara pusat dan pemda pada tiap tahapan dalam program KUBE dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1. Bagan Tahapan Pelaksanaan Program KUBE



Dalam buku petunjuk pelaksanaan program KUBE, terdapat tiga kegiatan pokok yang menjadi parameter/indikator keberhasilan sebuah kelompok KUBE. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kelompok KUBE mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Pada aspek kelembagaan
 - a. Terdapat kepengurusan dibuktikan dengan struktur dan terdapat pembagian tugas yang dijalankan sesuai kesepakatan antar anggota.
 - b. Terdapat administrasi kelompok meliputi:
 - 1) Buku rekening bank yang ditunjuk oleh penyelenggara program (BRI). Adapun nama pemilik rekening tidak boleh di atasnamakan perorangan, namun dengan nama kelompok KUBE.
 - 2) Terdapat buku daftar anggota kelompok.
 - 3) Terdapat buku tamu.
 - 4) Terdapat buku agenda atau kegiatan kelompok/ notulensi.
 - 5) Terdapat buku keuangan/ kas.
 - 6) Terdapat buku inventaris.
 - 7) Terdapat buku simpan pinjam.
 - c. Kerjasama antar anggota sudah terjalin dengan baik, timbulnya rasa percaya sesama anggota sebagai modal sosial dalam mengembangkan/memajukan KUBE.
 - d. Proses pengambilan keputusan sudah didasarkan pada musyawarah.
 - e. Pertemuan anggota berlangsung rutin dan dilakukan pencatatan seluruh kegiatan secara rutin.
2. Pada aspek sosial
 - a. Motivasi kelompok untuk menggunakan KUBE sebagai sebuah sarana sosial sudah terlihat baik dibuktikan dengan kehadiran 2/3 kehadiran anggota pada setiap pertemuan.
 - b. Terdapat koordinasi dan kekompakan kelompok.
 - c. Tanggung jawab sosial anggota terhadap kelompok terlihat dibuktikan dengan kesediaan masing-masing anggota untuk saling membantu jika terjadi musibah.

- d. Kepedulian sosial masing masing anggota KUBE terhadap kondisi anggota masyarakat di luar kelompok.
 - e. Usaha simpan pinjam KUBE sudah dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok.
 - f. Makan mengarah 4 sehat lima sempurna, jika salah satu anggota sakit, mampu berobat ke dokter.
 - g. Masing masing anggota memiliki peran aktif di masyarakat.
3. Pada aspek ekonomi
- a. Kegiatan berasal dari kredit bersubsidi.
 - b. Meningkatnya pendapatan keluarga.
 - c. Perkembangan usaha KUBE dijadikan usaha pokok.
 - d. Kinerja usaha berkembang menjadi 2 jenis usaha.
 - e. Kemampuan merencanakan usaha.
 - f. Memiliki tabungan yang terus bertambah.
 - g. Peluang pasar cukup luas.
 - h. Kemampuan untuk memupuk modal.
 - i. Kemampuan memanfaatkan dana usaha untuk mengembangkan usaha.
 - j. Simpan pinjam sudah berjalan dengan baik.
 - k. Kemitraan sudah berhasil dan berjalan dengan baik.

Profil KUBE Sejahtera VIII Berhati Nyaman 014

Kube Sejahtera VIII BERHATI NYAMAN 014 (selanjutnya disebut KUBE VIII/ 014) merupakan KUBE yang dibentuk pada tahun 2008. KUBE VII/ 014 berlokasi di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kube VIII/014 merupakan kelompok KUBE perkotaan yang pada awal berdirinya memiliki 10 orang anggota. Sebagaimana KUBE perkotaan pada umumnya, anggota KUBE VIII/014 memiliki multiusaha sesuai dengan keterampilan masing-masing. KUBE VIII/014 juga telah mendapatkan dua kali bantuan dana, yaitu:

1. Pada tahun 2008, mereka mendapatkan dana penumbuhan berasal dari dana dekonsentrasi Propinsi DIY sebesar 16 Juta (dari yang seharusnya 20 Juta). Hal ini dikarenakan anggota awal dibentuknya kelompok ini

berjumlah 8 orang. Masing-masing anggota mendapatkan 2 juta untuk penumbuhan usahanya.

2. Pada tahun 2011, mereka mendapatkan dana BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial) untuk tahap pengembangan usaha sejumlah 25 Juta.

Kondisi unik dialami oleh KUBE VIII/014, di mana anggota KUBE mengalami penyusutan dan pergantian. Anggota awal berjumlah 8 orang terdiri dari: Karni, Muji, Muyek, Sumidah, Lami, Jeffry, Tutik, dan Ida. Semenjak dana awal penumbuhan turun (tahun 2008) sejumlah 16 juta dan dibagi per anggota 2 juta, KUBE VIII/014 mengalami mati suri. Mati suri di sini adalah bahwa KUBE tersebut tidak melakukan kegiatan secara aktif.

Hingga pada tahun 2011 ketika dana BLPS akan diturunkan, KUBE VIII/014 ini berusaha untuk melakukan re-formasi ulang anggota dan alat kelengkapan KUBE. Pada tahun 2011, dana yang berhasil diselamatkan dari anggota sebesar 5 juta dan dijadikan sebagai modal awal untuk mengajukan kembali proposal BLPS. Pada tahun 2011, Pendamping Lokal dan anggota yang tersisa mereformasi ulang baik secara struktural, keanggotaan hingga usaha yang akan dilakukan. Adapun re-formasi anggota KUBE VIII/014, jenis usaha dan dana yang diterima masing masing anggota dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Daftar Nama Anggota, Jenis Usaha dan Jumlah Bantuan yang Diterima
Masing-Masing Anggota dari Dana BLPS 2011

No	Nama	Jenis Usaha	Dana yang Didapat
1	Lami Yuswani	Jual beli ternak burung	2.100.000
2	Sumarwiyati	Jual lumpia	2.030.000
3	Jeffry Halim	Tambal ban	4.072.500
4	Rahayu Prihantari	Menjahit	2.000.000
5	Esti Hariyanti	Menjahit	2.050.000
6	Husna Hidayati	Kelontong	2.450.000
7	Qoriah	Warung makan	3.084.000
8	Karni	Kelontong	2.405.000
9	Budi Amsiah	Jajanan dan makanan anak	2.100.000
10	Sri Sukarni	Pigura dan lukisan	2.500.000

Adapun kondisi usaha masing masing anggota, modal awal, dan rerata pendapatan perbulan sebelum mendapatkan dana BLPS dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. 2
Nama Anggota, Jenis Usaha, Modal Awal, Pendapatan Rerata Perbulan KUBE VIII/014 Sebelum Pencairan BLPS

No	Nama	Jenis Usaha	Modal Awal	Rerata Pendapatan/Bulan
1	Lami Yuswani	Jual beli ternak burung	850.000	5.000.000
2	Sumarwiyati	Jual lumpia	100.000	1.500.000
3	Jeffry Halim	Tambal ban	312.500	900.000
4	Rahayu Prihantari	Menjahit	400.000	500.000
5	Esti Hariyanti	Menjahit	200.000	1.500.000
6	Husna Hidayati	Kelontong	2.000.000	500.000
7	Qoriah	Warung makan	5.000.000	1.000.000
8	Karni	Kelontong	3.000.000	750.000
9	Budi Amsiah	Jajanan dan makanan anak	3.000.000	750.000
10	Sri Sukarni	Pigura dan lukisan	3.000.000	1.000.000

Analisis Keberhasilan Pemberdayaan pada Kelompok KUBE VIII/014

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memiliki kekuasaan menyuarakan apa yang menjadi pendapat mereka di masyarakat. Pemberdayaan juga diartikan bagaimana masyarakat miskin memiliki akses untuk ikut berkontribusi dalam setiap tahapan penentuan kebijakan yang menyangkut dirinya, baik dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan maupun pemilihan alternatif-alternatif yang sangat berimbang pada kepentingan komunitasnya (Foy, 1994).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksudkan dalam pemberdayaan mencakup kemandirian dalam hal berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Menurut Sulistyani (2004), kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demimencapai permasalahan yang sedang dihadapi. Lebih jauh, Sumodiningrat (1999) memberikan 5 (lima) indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Berkurangnya penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya produktivitas usaha anggota, makin kuatnya modal kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok untuk membangun jaringan di masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Di lain pihak, pemerintah sendiri telah memiliki indikator keberhasilan sebuah kelompok dapat dikatakan maju/produktif dengan kriteria 3 aspek, yaitu kelembagaan, sosial dan ekonomi. Sehingga merujuk pada pendapat Sumodiningrat (1999) dan indikator yang ditetapkan dalam juknis program KUBE tahun 2009-2015, didapat kesimpulan bahwa KUBE VIII/014 belum dapat dianggap sebagai KUBE maju/produktif.

Hal ini terjadi akibat kelompok KUBE VIII/014 tersendat dalam mengembangkan 2 aspek pilar utama KUBE yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek ekonomi.

1. Dilihat dari segi kelembagaan, KUBE VIII/014 memang telah memiliki struktur organisasi. Struktur anggota yang ada adalah ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Namun kondisi yang terjadi di lapangan saat ini adalah tidak terdapat pembagian tugas yang jelas dari tiap-tiap struktur organisasi. Bendahara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pembukuan kas dan masalah administrasi keuangan tidak diberi “kuasa” oleh ketua untuk memegang “uang”. Pembukuan dan uang hasil dana simpan pinjam dipegang oleh ketua kelompok.
2. Permasalahan muncul lagi ketika terbukti bahwa ketua KUBE VIII/014 menyalahgunakan wewenangnya dengan meminjamkan “uang simpan pinjam” kepada nonanggota KUBE (saudaranya), yang berimbas sulitnya anggota mendapat dana pinjaman dari kas kelompok. Selain

itu, ternyata pembukuan yang dilakukan oleh Ketua KUBE VIII/014 tidak jelas, sehingga anggota merasa tidak percaya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Ketua KUBE VIII/014, yaitu Ibu Lami.

Pertemuan rutin dilaksanakan namun selalu tidak dalam formasi lengkap. Hanya 4-6 orang yang aktif, sisanya hanya menyeter iuran. Hal ini berakibat pada gangguan terhadap kelancaran komunikasi antar pengurus dan anggota KUBE.

Komunikasi yang tersendat ini menjadi halangan kelompok mengembangkan rasa saling percaya, kepedulian, rasa memiliki hingga keinginan untuk tetap menjadi anggota. Pertemuan rutin yang tidak dihadiri 2/3 anggota ini juga memicu adanya konflik terbuka antar anggota kelompok seperti: (1) tidak terkontrolnya pembukuan kas yang dilakukan ketua, (2) dana modal kelompok yang dipakai oleh ketua, (3) pelengseran ketua lama akibat mosi tidak percaya anggota, (4) suksesi kepemimpinan yang gagal dibuktikan dengan belum ada sertijab ketua lama kepada ketua baru hingga (5) dana simpan pinjam yang ‘dihilangkan oleh ketua lama memicu upaya anggota untuk “memejahijaukan” ketua lama.

3. Dilihat dari segi ekonomi maka, terdapat beberapa anggota KUBE yang usahanya tidak berkembang. Dari 10 Anggota sejak penurunan dana BLPS, hanya 4 Usaha yang berkembang dan 1 usaha mati. Adapun profil usaha dimaksud dijabarkan di bawah ini:

- 1) Usaha tambal ban Bapak Jeffry

Usaha tambal ban Bapak Jeffry mengalami perkembangan, dana yang dipinjamkan pada tahun 2008 dibelikan kompresor untuk pengembangan usaha tambal bannya. Pada tahun 2011, beliau mendapatkan bantuan 4 juta yang kemudian dikembangkan menjadi usaha bengkel, dan diversifikasi usaha kelontong serta makanan titipan. Usaha Pak Jeffry ini juga memiliki jaringan dengan bengkel kampus UNY, yang kemudian dapat mengembangkan usaha tambal ban dan bengkel yang dimilikinya.

- 2) Usaha warung makan Ibu Qoriah

Usaha warung makan Ibu Qorih mengalami perkembangan di mana beliau memiliki jaringan dengan kontraktor pembangunan hotel didekat warungnya. Para pekerja bangunan hotel setiap sore makan di tempat beliau. Hal tersebut membantu Ibu Qorih mengembangkan usaha warung makannya.

3) Usaha Pigura dan lukis wajah ibu Sri

Usaha Ibu Sri mengalami perkembangan dari usaha pigura berkembang menjadi usaha lukis wajah dan juga memiliki warung. Pengembangan usaha tersebut dibantu oleh pinjaman bantuan yang diberikan oleh KUBE.

4) Usaha Ternak burung Ibu Lami

Usaha yang dilakukan oleh Ibu Lami bisa dikatakan gagal karena usahanya saat ini sudah tidak terlihat lagi wujudnya, uang yang dipinjamkan pun tidak dikembalikan.

5) Usaha Kantin Ibu Budi Amsiah

Setelah mendapatkan bantuan dari KUBE, usaha Ibu Budi Amsiah berkembang tidak hanya kantin di sekolah melainkan juga suaminya dapat menjual mie ayam. Sebelumnya Ibu Budi Amsiah juga mendapatkan bantuan diluar KUBE untuk perbaikan rumah.

Selain dari kedua indikator tersebut, KUBE VIII/014 belum dapat dianggap sebagai KUBE maju/ produktif juga karena tidak adanya modal sosial, antara lain:

1) Gotong-Royong

Gotong royong adalah salah satu bentuk modal sosial yang harusnya dimiliki tiap-tiap kelompok dalam KUBE. Sayangnya, pada KUBE VIII/014 belum ada gotong royong baik antar anggota maupun antar masyarakat diluar anggota.

2) Kepercayaan

Kepercayaan adalah modal utama yang harus dimiliki tiap-tiap anggota terhadap anggota lain dan juga kelompoknya. Pada KUBE VIII/014 terlihat tidak adanya kepercayaan satu sama lain, terlebih lagi terkait dengan uang yang ada.

3) Jaringan

Jaringan yang dimaksud disini adalah jaringan yang dibentuk untuk pengembangan usaha baik anggota maupun kelompok. Menurut Bapak Murti dalam wawancara yang telah dilakukan tidak ada jaringan yang terbentuk secara besar, misalnya saja beliau mengusulkan untuk Dinas Sosial membantu dalam pengembangan jaringan usaha makanan kecil yang bisa dipesan ketika Dinas Sosial mengadakan rapat, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan.

KUBE VIII/014 termasuk dalam KUBE yang tidak maju atau kurang produktif karena tidak memenuhi dua indikator KUBE dikatakan maju, yaitu dari segi kelembagaan dan segi ekonomi, selain itu juga dipengaruhi dengan tidak adanya modal sosial berupa gotong-royong, kepercayaan, serta jaringan.

Tata Kelola Pemberdayaan

Dari profil KUBE VIII/014 dapat diidentifikasi berbagai strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Apabila diuraikan lebih jelas terkait *stakeholders* yang terlibat dalam proses pemberdayaan pada kelompok KUBE VIII/014, setidaknya terdapat 6 pihak yang terlibat antara lain : a) Kementerian Sosial; b) Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta; d) pendamping lapangan; e) pendamping lokal; f) anggota kelompok; dan e) lain-lain (kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT). Masing-masing pihak memiliki peran dalam proses pemberdayaan pada kelompok ini. Uraian peran dan hubungan masing-masing pihak dengan pihak lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam program pemberdayaan KUBE dalam level nasional. Program KUBE merupakan salah satu program hasil inisiatif dari Kementerian Sosial yang dilaksanakan dalam skala/tingkat nasional. Oleh karena itu, Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program KUBE meskipun dalam pelaksanaan dan perkembangannya program pemberdayaan

ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh Dinas Sosial masing-masing kota untuk dapat terus terlaksana.

2. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kepanjangan-tanganan dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program KUBE ini di wilayah administratifnya. Tanggung jawab dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menentukan hasil beberapa kelompok yang akan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk dapat menerima bantuan.

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan pihak yang paling dekat dan bertanggung jawab terhadap kondisi berbagai kelompok di wilayahnya.

4. Pendamping lapangan

Pendamping lapangan merupakan pendamping yang dikontrak oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk membantu dalam program pemberdayaan di beberapa kelompok pemberdayaan. Jika Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bertanggung jawab terhadap semua kelompok KUBE yang ada di wilayahnya, pendamping lapangan ranah kerjanya dipersempit hanya beberapa kelompok KUBE.

5. Pendamping lokal

Pendamping lokal merupakan pendamping yang bertanggung jawab terhadap kelompok KUBE yang ada ditingkat kelurahan yang dulunya merupakan petugas sosial masyarakat yang bekerja secara sukarela. Pendamping lokal akan bekerja sama dengan pendamping lapangan untuk melaksanakan dan memantau kelompok KUBE di wilayahnya masing-masing.

6. Anggota kelompok penerima bantuan

Sebagai sebuah kesatuan kelompok KUBE yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan kelompok, walaupun memiliki

beban pada level individu, tetapi mereka merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat dalam sebuah kelompok.

7. Lain-lain (kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT)

Dukungan dari kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT setempat sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program pemberdayaan melalui KUBE ini. Bentuk dukungan dari kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT yaitu terkait dengan segala bentuk persetujuan administratif harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah, ketua RW, dan ketua RT.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam program pemberdayaan KUBE ini.

Kesimpulan

Hasil dari pengamatan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE pada KUBE VIII/014 mendapatkan kesimpulan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kelompok usaha bersama KUBE VIII/014 berdiri sejak tahun 2008. Kelompok ini sudah 2 kali mendapatkan bantuan, yaitu bantuan penumbuhan (dari Dekon) dan dana BLPS atau Pengembangan usaha.
2. KUBE VIII/014 dikategorikan sebagai KUBE yang tidak produktif dikarenakan sejak tahun 2008 hingga sekarang jumlah anggotanya mengalami bongkar pasang. Kondisi terakhir hanya 4 anggota aktif dengan jumlah dana yang bisa diselamatkan sejumlah 5 juta (hasil simpan pinjam yang terus bergulir) dalam hal ini berarti trilestari tidak berjalan:
 - a. Lestari kelembagaan (lembaga) → tidak terdapat rasa saling percaya antar anggota, adanya konflik dalam KUBE, pelengseran ketua lama, tidak terjalin komunikasi yang baik antar anggota, pertemuan rutin baru mulai aktif kembali sejak 2011.
 - b. Lestari usaha (ekonomi) → dari 10 jumlah usaha yang diusulkan menerima bantuan BLPS hanya bersisa 4 usaha yang berjalan.
 - c. Lestari Modal → usaha simpan pinjam sudah mulai berjalan lagi namun dana modal yang sudah dipupuk sejak 2011 diselewengkan oleh oknum.

3. Meskipun dikategorikan sebagai KUBE tidak produktif, KUBE VIII/014 beruntung mendapatkan bantuan usaha BLPS atau pengembangan usaha 2011. Hal ini dikarenakan ada satu anggota KUBE yang masih memiliki greget untuk terus berpartisipasi. Anggota ini sekaligus menginisiasi agar mengganti anggota agar BLPS dapat cair.
4. Motivasi anggota KUBE penerima BLPS yang tersisa untuk tetap ber-KUBE adalah untuk memanfaatkan dana KUBE sebagai dana pinjaman Modal.
5. Dari 4 anggota yang masih aktif, usaha rata rata mengalami perkembangan dibuktikan dengan adanya diversifikasi usaha anggota.
6. Adapun faktor yang memastikan ketidak-produktifan/kegagalan proses pemberdayaan KUBE VIII/014 di antaranya: a) Kriteria program KUBE; b) Mental individu penerima bantuan; c) Pendampingan yang dilakukan; d) Jaringan.

Saran dan Rekomendasi

Dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pemberdayaan melalui KUBE pada KUBE VIII/014, maka dapat diberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan KUBE sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah secara umum

Pemerintah seharusnya melakukan persiapan terhadap kondisi masyarakat pada saat sebelum kebijakan/program pemberdayaan masyarakat akan dilakukan, misalnya pada kebijakan/program KUBE ini yang harus dipersiapkan oleh pemerintah antara lain: a) data masyarakat penerima bantuan misalkan *by name, by adres*; b) kriteria program harus dipersiapkan misalkan masyarakat miskin yang sudah benar-benar memiliki embrio usaha; c) melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data masyarakat miskin karena mereka yang lebih mengetahui dan memahami kondisi masyarakatnya, dan d) rencana aksi dan implementasi harus dibuat dengan detail misalkan jadwal kegiatan mulai dan berakhirnya harus jelas, jangan terkesan tergesa-gesa sehingga menimbulkan berbagai permasalahan pada level implementasinya.

2. Untuk pendamping

Penguatan kapasitas bagi pendamping, baik pendamping lapangan dan pendamping lokal, perlu dilakukan yakni dengan mengikuti *workshop, training* dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitas.

3. Untuk KUBE VIII/014

Perekrutan anggota baru Kelompok KUBE VIII/014 harus sesuai dengan syarat seperti memiliki mental yang baik, sudah memiliki embrio usaha sehingga tinggal mengembangkan usahanya, dan berupaya untuk mengembalikan modal awal yang sudah dipinjamkan kepada anggota yang lama sehingga dapat menambah jumlah modal yang ada pada kelompok dengan anggota yang baru. Selain itu juga perlu melakukan penguatan kapasitas organisasi melalui memupuk modal sosial yang dimiliki seperti gotong royong, solidaritas antar anggota, kepercayaan dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Alfa Beta.

Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. CV Alfabeta.

Kementerian Sosial. 2011. *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta.

Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta. 2018. *Kelompok Usaha Bersama (KUBE): Berkumpulnya Orang Miskin untuk Mandiri*.

Website Kementerian Sosial: <https://www.kemosos.go.id/content/kube>.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama.